

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, maka informasi keuangan Negara yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan informasi laporan anggaran, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memunculkan tuntutan mengenai perlunya pemahaman teoritis dan praktis pada akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah, sebagai kunci dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat (Afiah,2009). Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintah telah dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) serta Kusumah (2012). Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Demikian pula penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh signifikan antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengelola keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *Good Governance* juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Dari aspek kualitas penataan personil yang dilakukan kerap kali tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*". Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumber daya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003). Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur (SDM) telah dilakukan oleh Indriasari dan Naharto (2008) dalam Sukmaningrum (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, tidak mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Sukmaningrum (2012) bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dalam Sukmaningrum (2012) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatan waktu.

Keuangan negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Negara. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat serta peran dari audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wakhyudi, 2005). Dengan dukungan sistem pengendalian intern

yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) yang menguji pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme *Good Corporate Governance*, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap GCG. Berdasarkan pemaparan diatas maka motivasi dilakukannya penelitian ini adalah karena masih adanya kesenjangan (*research gap*) pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil lokasi pada **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang**.

Motivasi tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti, artinya bagaimana peran dan audit internal, kompetensi aparatur, penerapan SAP. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan pendahuluan di atas yang menjadi masalah pokok adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD KABUPATEN KUPANG.

1.3. Persoalan Penelitian

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimanakah pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimanakah pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Untuk menguji pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.2. Tujuan Antara

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris sebagai bahan pembelajaran tentang gambaran penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal, kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kupang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pembuat keputusan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangannya dengan memperhatikan berbagai faktor pembentukan keberhasilan kualitas laporan keuangan seperti penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal dan motivasi kerjanya sehingga tercipta laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.